

Jaminan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia menurut hukum keuangan publik = Government guarantees in infrastructure development financing in Indonesia according to the law of public finance

Ahmad Madison, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431320&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik. Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminan tersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat, efisien dan akuntabel.

ABSTRACT

This thesis discusses the provision of Government Guarantees in Infrastructure Development Financing in Indonesia According to the Public Finance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushing the wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide government guarantees , the government must be based on legislation applicable is the law of public finances . Provision of Government Guarantees in Infrastructure Development Financing in Indonesia should be through the mechanism of the state budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , the government must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of such guarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in Infrastructure Development Financing in Indonesia should be done with the proper , efficient and accountable.